

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

India pada abad ke-16 merupakan salah satu kawasan dengan tingkat keberagaman sosial dan keagamaan yang sangat tinggi. Masyarakat India terdiri atas berbagai kelompok etnis, budaya, bahasa, dan agama seperti Hindu, Islam, Jain, Buddha, Sikh, serta komunitas keagamaan lainnya yang hidup berdampingan dalam satu wilayah politik. Di tengah pluralitas tersebut, hubungan antarkelompok tidak selalu berlangsung harmonis karena adanya perbedaan keyakinan, kepentingan politik, dan struktur sosial yang kompleks. Sistem kasta dalam masyarakat Hindu, posisi umat Islam sebagai kelompok penguasa minoritas, serta munculnya berbagai gerakan keagamaan baru turut membentuk dinamika sosial yang beragam. Kondisi ini menjadikan India sebagai ruang historis yang menarik untuk mengkaji bagaimana keberagaman dapat menjadi sumber konflik sekaligus potensi integrasi sosial.¹

Sebelum pemerintahan Sultan Jalaluddin Akbar, hubungan antara komunitas Hindu dan Muslim di India sering kali diwarnai oleh ketegangan sosial dan politik. Sejak masa Kesultanan Delhi hingga periode awal Mughal, kebijakan pemerintahan cenderung berorientasi pada dominasi politik kelompok penguasa Muslim terhadap mayoritas penduduk Hindu. Kebijakan seperti penerapan

¹ Ahmad Mir Ishfaq, "Babur The Founder Of Mughal Empire In India," *IJSET*, Vol.2, No.3, 2023, hlm. 1297.

jizyah, pembatasan akses politik bagi non-Muslim, serta konflik berkepanjangan dengan kerajaan-kerajaan Rajput memperkuat jarak sosial antara kedua komunitas tersebut. Di sisi lain, perbedaan teologis dan budaya turut memperbesar potensi konflik yang dapat mengancam stabilitas negara. Akibatnya, India menjelang naiknya Akbar ke takhta berada dalam kondisi sosial-keagamaan yang rentan terhadap perpecahan dan disintegrasi.²

Ketika Jalaluddin Akbar naik takhta pada tahun 1556 M, ia mewarisi sebuah kekaisaran yang belum sepenuhnya stabil baik secara politik maupun sosial. Selain menghadapi ancaman pemberontakan dari berbagai wilayah, Akbar juga harus berhadapan dengan realitas masyarakat yang sangat majemuk dan terfragmentasi. Berbeda dengan sebagian pendahulunya yang mengandalkan pendekatan militer dan dominasi politik, Akbar memilih strategi yang lebih inklusif dalam mengelola keberagaman. Ia berupaya membangun loyalitas masyarakat melalui pendekatan toleransi, dialog, dan integrasi sosial. Pilihan politik tersebut kemudian menjadi salah satu faktor penting yang mengubah wajah Kekaisaran Mughal menjadi kekuatan besar yang relatif stabil selama masa pemerintahannya.³

Kebijakan toleransi Akbar diwujudkan melalui berbagai langkah konkret yang berlandaskan konsep *Sulh-i Kul* atau perdamaian universal. Konsep ini menekankan penghormatan terhadap seluruh kelompok agama tanpa memandang perbedaan

² Siti Maulidiya Agustin & Arbi "Kerajaan Mughal: Puncak Peradaban Islam di Tengah Dominasi Agama Hindu di India," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.8, No.3, 2024, hlm. 42484.

³ *Ibid.*

keyakinan. Dalam praktiknya, Akbar menghapus pajak jizyah bagi non-Muslim, membuka kesempatan bagi kaum Hindu untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, menjalin aliansi politik dengan para penguasa Rajput, serta memfasilitasi dialog antaragama melalui lembaga Ibadat Khana. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan kerukunan, tetapi juga membangun fondasi integrasi sosial yang mampu memperkuat legitimasi dan stabilitas kekaisaran. Oleh karena itu, toleransi pada masa Akbar tidak dapat dipahami semata sebagai sikap personal seorang penguasa, melainkan sebagai strategi politik yang memiliki dampak luas terhadap pembentukan masyarakat plural.⁴

Pentingnya penelitian mengenai Jalaluddin Akbar terletak pada posisinya sebagai salah satu penguasa Muslim yang berhasil mengelola masyarakat multireligius dalam skala kekaisaran. Keberhasilannya mempertahankan stabilitas politik di tengah keragaman agama dan budaya menjadikan pemerintahannya sebagai salah satu periode paling penting dalam sejarah Mughal India. Pengalaman historis tersebut juga memiliki relevansi dengan kondisi masyarakat modern yang terus dihadapkan pada tantangan pluralisme, toleransi, dan integrasi sosial. Kajian mengenai Akbar dapat memberikan pemahaman bahwa keberagaman tidak selalu menjadi sumber konflik apabila dikelola melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga memberikan kontribusi

⁴ Rachmat Panca Putera, "Identitas dan Toleransi: Konsep Utama dalam Rethinking Multiculturalism," *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, Vol. 3, No. 4, 2024, hlm. 32.

konseptual terhadap studi mengenai toleransi dan masyarakat plural.⁵

Meskipun kajian mengenai Jalaluddin Akbar atau sejarah Mughal telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek politik pemerintahan, perkembangan peradaban Mughal, sinkretisme budaya, maupun hubungan antaragama secara umum yang ada di sana. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menempatkan kebijakan toleransi Jalaluddin Akbar sebagai bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai politik, agama, ekonomi atau kebudayaan Mughal. Penelitian terdahulu juga umumnya lebih menitikberatkan pada deskripsi kebijakan dan dampak politiknya tanpa menjelaskan secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut bekerja sebagai mekanisme integrasi sosial dalam masyarakat yang majemuk. Padahal, keberhasilan Jalaluddin Akbar mempertahankan stabilitas Mughal tidak dapat dilepaskan dari kemampuannya mengelola keragaman agama, etnis, dan budaya yang hidup di India abad ke-16 M.⁶

Ruang kajian mengenai hubungan antara kebijakan toleransi yang diterapkan Jalaluddin Akbar dengan proses terbentuknya masyarakat plural dalam lingkungan Kekaisaran Mughal masih belum dibahas secara komprehensif. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya belum memanfaatkan perspektif

⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

⁶ Mohammad Zia dkk, "Administrative and Economic Systems of the Mughal Empire: A Historical Analysis of Governance and Revenue Policies," *Sprin Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, Vol. 3 No. 7, 2024, hlm. 12-15.

multikulturalisme untuk menganalisis kebijakan toleransi Jalaluddin Akbar. Akibatnya, pembahasan mengenai toleransi sering kali berhenti pada uraian normatif tentang sikap terbuka Jalaluddin Akbar terhadap kelompok non-Muslim, tanpa menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut menghasilkan integrasi sosial yang mampu menopang kehidupan masyarakat India yang multikultural dan multireligius.⁷

Ketiadaan analisis teoritis tersebut menunjukkan adanya kesenjangan konseptual yang masih perlu dijelaskan melalui penelitian yang lebih mendalam. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menempatkan kebijakan toleransi Jalaluddin Akbar sebagai fokus utama analisis untuk menjelaskan proses pembentukan masyarakat plural di Mughal India. Penelitian ini tidak hanya mengkaji bentuk dan implementasi kebijakan toleransi, tetapi juga menganalisis bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial yang mendorong terbentuknya masyarakat plural. Dengan demikian, penelitian berjudul “Kebijakan Toleransi Sultan Jalaluddin Akbar (1556-1605 M) dalam Pembentukan Masyarakat Plural di Kekaisaran Mughal India” ini berupaya mengisi kekosongan kajian yang belum banyak disentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

⁷ Annisa Qurratul, Edi Yustianto, “Kerajaan Mughal: Puncak Peradaban Islam di Tengah Dominasi Agama Hindu di India,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol. 4 No. 3, 2026, hlm. 16361-16363.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan suatu hal yang paling penting agar lebih fokus pada pembahasannya, batasan masalah mempersempit fokus penelitian sehingga dapat mempelajari interaksi yang diteliti secara lebih detail dan tuntas.⁸ Pertama, secara spasial penelitian ini berada pada wilayah kekuasaan Jalaluddin Akbar yaitu di Mughal India. Kedua, secara temporal dalam rentang 1556-1605 M. Ketiga, secara material analisis ini akan berfokus pada identifikasi, implementasi, dan kebijakan toleransi Jalaluddin Akbar terhadap kebijakan *Sulh-i Kull*, penghapusan jizyah, integrasi elite Hindu-Rajput, dan dialog antaragama sebagai instrumen pembentukan masyarakat plural.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah serangkaian kunci yang dibuat oleh peneliti. Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan fokus, ruang lingkup, dan tujuan utama dari seluruh proses penelitian.⁹ Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana kondisi sosial-keagamaan sebelum Mughal India sebelum dan pada masa pemerintahan Jalaluddin Akbar?

⁸ Nisa Apriyani & Sandra Dewi Ika, "Pengaruh Layanan Informasi dengan Teknik Focus Discussion Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas X di SMK Negeri 3 Medan Tahun Pembelajaran 2021/2022," *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, Vol.3, No.3, 2022, hlm. 132.

⁹ Al Ikhlas dkk, "Masalah Penelitian/Research Problem; Pengertian dan sumber masalah, Pertimbangan, Kriteria Pemilihan Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Landasan Teori," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No.2, 2023, hlm. 8.

2. Bagaimana implementasi kebijakan toleransi Jalaluddin Akbar di Mughal India?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan toleransi Jalaluddin Akbar terhadap pembentukan masyarakat plural di Mughal India?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi sosial-keagamaan Mughal India sebelum dan pada masa pemerintahan Jalaluddin Akbar.
2. Mengetahui implementasi kebijakan toleransi Jalaluddin Akbar di Mughal India.
3. Menganalisis pengaruh kebijakan toleransi Jalaluddin Akbar terhadap pembentukan masyarakat plural di Mughal India.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, pembaca dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Teori tentang Pembentukan Masyarakat Pluralis yang Berhasil: Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memungkinkan terwujudnya masyarakat pluralis yang relatif stabil dan makmur dalam konteks kekaisaran multietnis dan multireligius. Dengan

menganalisis peran Jalaluddin Akbar pada tahun 1556-1605 M dalam mewujudkan masyarakat pluralis di Mughal India, penelitian dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip kunci dan mekanisme yang efektif dalam mengelola keberagaman.

- b. Penyediaan Studi Kasus Historis yang Relevan untuk Konteks Kontemporer: Penelitian mendalam tentang keberhasilan (dan tantangan) Akbar dalam mewujudkan masyarakat pluralis di Mughal India dapat menyediakan studi kasus historis yang relevan dan berharga untuk memahami masyarakat pluralis di dunia kontemporer. Dalam era globalisasi dan meningkatnya interaksi antar budaya dan agama, tantangan dalam mengelola keberagaman dan mencegah konflik menjadi semakin penting. Analisis terhadap pendekatan Akbar, termasuk toleransi beragama, integrasi elit, dan promosi dialog antar kepercayaan, dapat memberikan pelajaran dan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan aktivis yang berupaya membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis di berbagai belahan dunia saat ini.

2. Manfaat Praktis

Penulis dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam memecahkan permasalahan dan tercapainya tujuan di atas, maka penulis melakukan tinjauan pustaka guna mendapatkan kerangka berpikir dan mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Namun penulis tidak menemukan Skripsi maupun jurnal yang memiliki tema dan pembahasan yang serupa.

1. Eva Mudzdalifah dari perguruan tinggi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2021 dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Peranan Kerajaan Mughal Terhadap Perkembangan Peradaban Islam di India” Penelitian Eva Mudzdalifah (2021) mengambil sudut pandang makro dengan menitikberatkan pada kontribusi menyeluruh Kerajaan Mughal terhadap kemajuan peradaban Islam di India, sementara penelitian tentang Kebijakan Toleransi Jalaluddin Akbar (1556-1605 M) memilih fokus mikro yang secara spesifik membedah kebijakan politik-keagamaan satu penguasa serta dampaknya langsung terhadap pembentukan keharmonisan masyarakat yang pluralis.
2. Nita Nurlaela Azahra dari perguruan tinggi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2022 dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Implikasi Kebijakan Politik dan Agama Sultan Jalaluddin Akbar (1556-1605 M) di Mughal India” Penelitian Nita Nurlaela Azahra (2022) menitikberatkan pada implikasi kebijakan politik dan agama Akbar, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis hubungan antara kebijakan toleransi Akbar dengan proses pembentukan masyarakat plural di Mughal India.

3. Aisyah Zahrotunnisa dkk dalam jurnal intelektual dan cendekiawan Nusantara pada Mei 2025 yaitu penelitian artikelnya yang berjudul “Sejarah Dinasti Mughal: Perpaduan Budaya Islam dan Hindu di India” artikel Aisyah Zahrotunnisa dkk (2025) menggunakan pendekatan kultural lintas generasi yang menitikberatkan pada hasil akhir akulturasi dan perpaduan nyata antara budaya Islam dan Hindu dalam peradaban Dinasti Mughal, sedangkan penelitian tentang Kebijakan Toleransi Jalaluddin Akbar (1556-1605 M) menggunakan pendekatan sosio-politik yang secara spesifik membedah strategi serta instrumen kebijakan seorang penguasa dalam mengelola dan membangun integrasi sosial di tengah masyarakat yang pluralis.
4. Rizqina Tsania dkk dalam jurnal sejarah Islam pada Mei 2023 yaitu penelitian artikelnya yang berjudul “Islam di India pada masa kepemimpinan Sultan Akbar (1556-1605 M)” Penelitian ini menitikberatkan pada analisis mendalam dan menyeluruh mengenai kebijakan toleransi Sultan Jalaluddin Akbar guna mengevaluasi kajian terdahulu yang dinilai terlalu universal dan kurang komprehensif. Hubungannya dengan judul yang diajukan tidak menunjukkan perbedaan substansial, melainkan sebuah keselarasan yang saling melengkapi, sementara judul "Kebijakan Toleransi Jalaluddin Akbar 1556-1605 M dalam Pembangunan Masyarakat Pluralis di Mughal India" hadir sebagai wadah formal yang mempertegas batasan kronologis (1556–1605 M) serta fokus sosiologisnya dalam mewujudkan analisis yang lebih spesifik dan mendalam tersebut.

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kelemahan Penelitian	Posisi Penelitian Saat Ini
1	Eva Mudzdalifah	Metode sejarah dengan studi pustaka	Menunjukkan bahwa Kerajaan Mughal memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan politik, ekonomi, pendidikan, seni, arsitektur, dan peradaban Islam di India.	Kajian masih bersifat umum pada Dinasti Mughal secara keseluruhan dan tidak mengkaji secara khusus kebijakan toleransi Sultan Akbar serta dampaknya terhadap masyarakat plural.	Penelitian ini lebih spesifik dengan fokus pada kebijakan toleransi Jalaluddin Akbar dan pengaruhnya terhadap pembentukan masyarakat plural di Mughal India.
2	Nita Nurlaela Azahra	Metode sejarah melalui studi literatur	Menjelaskan implikasi kebijakan politik dan agama Akbar terhadap stabilitas pemerintahan Mughal serta hubungan antarumat beragama.	Penelitian lebih menitikberatkan pada implikasi politik dan agama secara umum, belum mengkaji secara mendalam hubungan kebijakan toleransi dengan proses terbentuknya masyarakat plural.	Penelitian ini mengkaji secara khusus bagaimana kebijakan toleransi Akbar menjadi instrumen integrasi sosial dan pembentukan masyarakat plural di India.
3	Aisyah Zahrotunnisa dkk.	Metode deskriptif-kualitatif berbasis studi pustaka	Menunjukkan adanya akulturasi dan sintesis budaya Islam-Hindu yang membentuk karakter khas peradaban Mughal.	Kajian hanya menyoroti hasil akulturasi budaya dan belum menjelaskan kebijakan negara yang melatarbelakangi terciptanya integrasi tersebut.	Penelitian ini berfokus pada kebijakan toleransi Akbar sebagai faktor utama yang mendorong terbentuknya integrasi sosial dan masyarakat plural.

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kelemahan Penelitian	Posisi Penelitian Saat Ini
4	Rizqina Tsania dkk.	Metode penelitian sejarah dan studi pustaka	Menjelaskan perkembangan Islam, kepemimpinan Akbar, serta kondisi sosial-keagamaan India pada masa pemerintahannya.	Pembahasan masih bersifat umum mengenai pemerintahan Akbar dan belum secara spesifik menghubungkan kebijakan toleransi dengan pembentukan masyarakat plural.	Penelitian ini mempersempit fokus pada kebijakan toleransi Akbar, seperti Sulh-i Kul, penghapusan jizyah, integrasi elite Hindu-Rajput, dan dialog antaragama sebagai sarana pembentukan masyarakat plural.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa historiografi mengenai Jalaluddin Akbar dan Mughal cenderung berkembang dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, kajian yang berfokus pada aspek politik dan pemerintahan Akbar, terutama yang berkaitan dengan stabilitas kekuasaan dan strategi kepemimpinannya. Kedua, kajian yang menyoroti hubungan antaragama dan kebijakan toleransi Jalaluddin Akbar sebagai bagian dari kebijakan keagamaan Mughal di India. Ketiga, kajian yang menekankan proses akulturasi budaya antara Islam dan tradisi Hindu India. Berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami sejarah pemerintahan Jalaluddin Akbar, namun sebagian besar masih menempatkan kebijakan toleransi sebagai

bagian dari pembahasan politik, agama, atau budaya secara terpisah.

Selain itu, masyarakat plural sering kali diposisikan sebagai latar sosial semata, bukan sebagai hasil historis yang terbentuk melalui proses dan kebijakan tertentu. Dengan demikian, masih terdapat ruang historiografis untuk mengkaji hubungan antara kebijakan toleransi Jalaluddin Akbar dan proses pembentukan masyarakat plural dalam lingkungan Kekaisaran Mughal. Penelitian ini berupaya mengisi ruang historiografis tersebut dengan menempatkan kebijakan toleransi sebagai fokus utama analisis. Berbeda dengan kecenderungan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek politik, agama, atau akulturasi budaya secara terpisah, penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana kebijakan toleransi Akbar berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial yang memungkinkan berbagai kelompok agama dan budaya hidup berdampingan dalam satu sistem sosial dan politik.

G. Landasan Teori

Penulis mencoba untuk meneliti dan menulis kembali terkait peristiwa yang telah terjadi di masa lalu sebagai tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi pada masa tersebut. Jika kita tidak mencoba merekonstruksinya maka sampai kapan pun tidak akan tahu apa yang menjadi latar belakang dari sebuah peristiwa tersebut. Sebagai penulis maka perlu adanya landasan teori sebagai landasan berfikir agar tulisan ini dapat terus menggali

informasi dan mengembangkan penelitiannya. Maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Bikhu Parekh yaitu *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, gagasan utamanya adalah merumuskan struktur politik yang bisa diterapkan dalam masyarakat multikultural untuk mengatasi konflik dan memperbaiki hubungan antar kelompok. Parekh menawarkan solusi untuk berbagai masalah, seperti integrasi politik, struktur kekuasaan, kebudayaan umum, keadilan, hak-hak kolektif, pendidikan multikultural, dan identitas nasional. Dalam konteks ini, ia menekankan peran penting negara sebagai pelindung dan penjamin bagi semua warganya dari segala bentuk diskriminasi.¹⁰

Beberapa perbedaan pluralitas, multikulturalisme dan toleransi. Pluralitas yaitu kondisi atau kenyataan bahwa suatu masyarakat bersifat majemuk atau beragam. Multikulturalisme ialah pandangan atau ideologi yang tidak sekadar mengakui keragaman, tetapi juga mewajibkan adanya kesetaraan, penerimaan, dan kebijakan yang menghargai kebudayaan kelompok lain. Sedangkan toleransi adalah Sikap saling menghargai, membiarkan, dan menghormati keyakinan, pendapat, atau perilaku yang berbeda dengan diri sendiri. Singkatnya Parekh menyerukan agar kita tidak hanya hidup

¹⁰ Muhammad Ihsanul Arief, "Dinamika Masyarakat Multikultural: Peta Pemikiran Bhikhu Parekh Terhadap Perbedaan Budaya Untuk Penguatan Keragaman," *Religion: Jurnal Agama sosial dan budaya*, Vol.3, No.2, 2024, hlm. 131.

bersama di tengah perbedaan budaya, tetapi juga berinteraksi, saling menghormati, dan memastikan semua orang mendapatkan perlakuan yang setara sehingga tercipta masyarakat yang bersatu dan adil dalam keragamannya.

Dalam penelitian ini, konsep masyarakat plural yang dikemukakan Bhikhu Parekh digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan toleransi Jalaluddin Akbar terhadap kehidupan sosial masyarakat Mughal. Agar dapat digunakan sebagai alat analisis, konsep tersebut dioperasionalkan ke dalam beberapa indikator. Pertama, adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan budaya. Kedua, adanya kesempatan yang setara bagi kelompok yang berbeda untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Ketiga, berkembangnya interaksi serta dialog antar kelompok yang berbeda. Keempat, terpeliharanya identitas budaya maupun keagamaan masing-masing kelompok dalam kehidupan masyarakat. Keempat indikator tersebut digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan toleransi Jalaludin Akbar berkontribusi terhadap terbentuknya masyarakat plural di India pada masa Dinasti Mughal.¹¹

2. Teori integrasi sosial berakar pada paradigma fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, menurutnya masyarakat sebagai sebuah sistem sosial yang

¹¹ Emilia Sahira, "Keberagaman dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia: Kajian atas Pemikiran Bikhu Parekh," *Journal of Civic Education*, Vol.8, No.1, 2025, hlm. 72.

senantiasa bergerak menuju titik keseimbangan. Talcott Parsons menyatakan bahwa stabilitas suatu sistem sosial bergantung pada empat fungsi mutlak: Adaptasi (*Adaptation*) oleh subsistem ekonomi untuk mengelola sumber daya, Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*) oleh subsistem politik untuk menetapkan dan mengejar target bersama, Integrasi (*Integration*) oleh institusi hukum untuk menjaga harmoni dan meredam konflik antarbagian, serta Pemeliharaan Pola (*Latency*) oleh lembaga budaya dan agama untuk melestarikan nilai serta norma di masyarakat. Penelitian utama ini menggunakan unsur Integration karena fokus penelitian adalah integrasi masyarakat plural.¹²

Dalam perspektif ini, integrasi sosial mencakup dua dimensi utama, kemampuan sistem dalam meredam konflik serta penyimpangan, dan upaya menyelaraskan berbagai elemen masyarakat demi mewujudkan ketertiban. Secara praktis, proses ini berfungsi sebagai jembatan untuk menyatukan beragam kelompok sosial dengan cara meminimalisir kesenjangan yang muncul akibat perbedaan latar belakang, seperti wilayah, budaya, agama, status sosial, maupun kepentingan tertentu.

teori struktural fungsional Talcott Parsons digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan toleransi Akbar berfungsi dalam menjaga keteraturan sosial di tengah

¹² Sindi Aprilia, "Implementasi Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons Dalam Upaya Melestarikan Tradisi Islam Melayu Nanggung Dulang di Bangka Belitung," *DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 01, No. 01, 2022. Hlm. 32-33.

masyarakat yang multikultural. Dalam penelitian ini, konsep AGIL dioperasionalkan melalui empat indikator analisis. Pertama, *adaptation* (adaptasi) yang ditunjukkan oleh kemampuan pemerintahan Akbar menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial masyarakat India yang beragam. Kedua, *goal attainment* (pencapaian tujuan) yang terlihat dari upaya mewujudkan stabilitas politik dan memperkuat legitimasi pemerintahan Mughal. Ketiga, *integration* (integrasi) yang ditunjukkan melalui penyatuan berbagai kelompok agama dan budaya ke dalam satu sistem sosial dan politik. Keempat, *latency* (pemeliharaan pola) yang tercermin dalam upaya menanamkan nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode sejarah, yaitu melalui metode sejarah, kita akan meneliti keaslian dan validitas dari sumber-sumber data yang ada.¹⁴ Tiga komponen utama yang membentuk sejarah adalah pelaku (manusia), tempat (ruang), dan saat (waktu).¹⁵ Karena itu, sejarawan akan selalu memakai sumber sebagai dasar saat merangkai ulang sebuah peristiwa. Kalau sumbernya dirasa kurang kuat, mereka tidak akan

¹³ Umikalsum Afif, "Integrasi Sosial Dalam Membangun Keharmonisan Masyarakat," *JAWI*, Vol. 2, No.1, 2019, hlm. 69-70.

¹⁴ Anwar Sanusi, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Cirebon: Syekh Nurjati Press, 2013), hlm. 48.

¹⁵ Egri Jayanti & Eriyanti Fitri, "Analisis Peran Sumber Sejarah Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat," *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Vol.7, No.2, 2022, hlm. 302.

gegabah melangkah. Sikap hati-hati ini penting supaya hasil rekonstruksinya akurat dan sesuai fakta.¹⁶

Menurut Kuntowijoyo ada lima tahapan dalam melakukan penelitian sejarah:

1. Pemilihan Topik

Dalam menentukan topik kerap kali menjadi titik penulis mengalami fase bimbang dalam pemilihan topik, namun hal ini yang akan menjadi tantangan dan tolak ukur pemahaman penulis itu sendiri dalam menentukan topik yang akan diteliti. Dalam menetapkan topik penelitian, peneliti wajib memenuhi empat pertimbangan esensial. Pertama, mereka harus memiliki kapasitas penelitian yang memadai, mencakup pengetahuan, waktu, dan dana yang cukup, ditambah idealnya adanya jaringan kolaborasi. Kedua, topik yang dipilih harus didukung oleh ketersediaan sumber data yang memadai dan mudah diakses untuk dianalisis. Ketiga, topik harus penting dan relevan, serta mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan. Terakhir, minat pribadi peneliti mutlak diperlukan, karena ketertarikan ini akan menjadi pendorong utama untuk melaksanakan penelitian secara maksimal.¹⁷

¹⁶ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik*, (Gresik: JSI Press, 2020), hlm. 46-47.

¹⁷ Tri & Pahlevi Daradjati Keke, "Pelatihan Pemilihan Topik dan Penyusunan Sistematika Penulisan Sejarah Mahasiswa Prodi S-1 Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro," *Jurnal Harmoni*, Vol.9, No.1, 2025, hlm. 4.

1. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Tahap pengumpulan sumber, merupakan langkah awal yang krusial sebelum penulisan sejarah dimulai. Pada tahap ini, seorang penulis sejarah perlu terlebih dahulu mengidentifikasi Sumber tersebut, karena sumber sejarah dilihat dari mana sumber tersebut berasal. Sumber sejarah dibagi menjadi tiga kategori yaitu primer, sekunder, dan tersier.¹⁸ Selanjutnya, melalui studi pustaka, penulis secara aktif mengumpulkan berbagai data dan tulisan yang relevan, baik dari sumber daring (internet) maupun luring (perpustakaan). Dalam konteks penelitian mengenai "Kebijakan toleransi Jalalluddin Akbar 1556-1605 M dan pembentukan masyarakat plural di Mughal India," studi pustaka ini akan fokus pada pengumpulan materi-materi yang berkaitan dengan kondisi kerajaan Mughal India pada masa pemerintahan Jalaluddin Akbar dan kebijakan toleransi Jalaluddin Akbar mewujudkan masyarakat plural di kerajaannya.

2. Verifikasi

Verifikasi merupakan langkah yang paling penting dan menentukan adalah Kritik Sumber. Tahap ini mengharuskan kita untuk menilai dan menguji semua sumber secara mendalam, dengan satu-satunya tujuan untuk memastikan kebenaran faktual atau kenyataan dari isinya.¹⁹ Guna

¹⁸ Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2020), hlm. 26.

¹⁹ Waskino & Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah*, (Bantul: Magnum Utama Utama, 2018), hlm. 12.

membedah dinamika masa pemerintahan Kekaisaran Mughal, teknik pengumpulan sumber dilakukan melalui studi dokumenter yang memisahkan antara data primer dan sekunder. Penulis melakukan kritik sumber secara mendalam terhadap sumber primer kontekstual, yaitu naskah Akbarnama jilid I, karya Abu'l Fazl, diedit oleh H Beveridge, (New Delhi; Saeed Internasional, 1989) dan bahan rujukan utama halaman 142. Akbarnama jilid II karya Abu'l-Fazl, diedit oleh H Beveridge, (Calcutta, The Asiatic Society, 2000) dan bahan rujukan utama halaman 35. *Ain-i-Akbari Vol III*, diedit oleh Colonel H. S. Jarret (Calcutta; the baptis mission Press) dan bahan rujukan utama pada halaman 1-3. Proses kritik ini tidak hanya menguji aspek fisik dokumen (kritik eksternal), tetapi juga menakar subjektivitas, tendensi politik penulis istana, dan akurasi faktual di dalam teks tersebut (kritik internal).

Sebagai pengimbang dan penguat analisis, data sekunder dikumpulkan dari literatur otoritatif, seperti *The Mughal Empire*, penulis John F Richard (London; Cambridge University Press, 2001). *The Wonder That Was India*, penulis S. A. A. Rizvi (London; Picador, 2005). *Medieval India From Sultanat To The Mughals Part Two Mughal Empire (1526-1748)*, penulis Satish Chandra, (New Delhi; Publications Pvt. Ltd, 1999). *The Mughal Of India*, Penulis Harbans Mukhia, (Malden Massachusetts dan Oxford, Blackwell Publishing, 2004). *Sejarah Peradaban Islam* (Dr. H. Syamruddin Nasution, M.Ag.). *Sejarah Muslim India* (Dr. Muhammad Abdul Azhim An-Nashr). Serta kajian spesifik seperti karya Fahmi Rizal

Mahendra (*Sejarah Kerajaan Mughal 1526-1857 M*) dan Sandi Nur Rohman (*Dinasti Mughal: Menelusuri Jejak Peradaban Islam di Tanah Hindustan*). Seluruh sumber tersebut dikonfrontasikan satu sama lain melalui teknik triangulasi data untuk mengeliminasi bias personal maupun politis.

Selanjutnya, analisis sumber dalam penelitian ini dibedah menggunakan pendekatan sejarah sosial-politik. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian tidak hanya tertuju pada narasi elite atau kebijakan hukum formal semata, melainkan pada interaksi timbal balik antara struktur kekuasaan (politik) dan respons masyarakat India yang plural (sosial). Dengan pisau analisis sosial-politik, kebijakan seperti penghapusan pajak *jizyah*, konsep *Sulh-i Kul*, dialog antar agama dan aliansi pernikahan militer dengan Rajput tidak sekadar dilihat sebagai keputusan dari Sultan Akbar, melainkan sebagai sebuah strategi negosiasi kekuasaan demi meredam batasan sosial, merangkul faksi lokal, dan membangun legitimasi politik yang inklusif di atas keberagaman kultural Hindustan.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah tahap penafsiran dalam penelitian sejarah, di mana pemahaman terhadap suatu peristiwa bisa bervariasi antar individu. Meskipun demikian, seorang sejarawan atau peneliti wajib melakukan interpretasi berdasarkan metodologi sejarah yang ketat. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa data yang

dikumpulkan dapat menjelaskan masalah yang ada secara menyeluruh.²⁰

4. Historiografi

Tahap akhir penelitian sejarah adalah historiografi (penulisan sejarah), di mana sejarawan bertugas menyampaikan kesimpulan analisis secara jelas dan mudah dipahami. Kualitas karya ini ditentukan secara mutlak oleh akurasi dan kedisiplinan penulisnya. Meskipun terdapat klasifikasi antara sejarah yang baik dan yang buruk (*poor history*), tantangan terbesarnya adalah laporan yang dibuat dengan buruk sekalipun akan tetap dianggap sebagai catatan sejarah.²¹

I. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan, latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, pembatasan masalah, manfaat penulisan, landasan teori, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Kondisi sosial politik kekaisaran Mughal menjelang pemerintahan Jalaluddin Akbar; Berdirinya Kekaisaran Mughal, Struktur Masyarakat India Abad ke-16, , Kondisi Sosial Keagamaan India Menjelang Pemerintahan Akbar .

BAB III: Biografi dan kondisi sosial keagamaan pada masa jalaluddin Akbar; Biografi dan dinamika jalaluddin akbar naik

²⁰ Usmaedi, "Oeang Republik Indonesia Daerah Banten Sementara (ORIDABS): Sejarah dan Peranannya Dalam Perekonomian Daerah Banten 1947-1948," *Kala Manca: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol.11, No.2, 2023, hlm. 55.

²¹ Ahmad Maksum, "Interpretasi Sejarah Sebagai Peristiwa dan Masalah Pendidikan," *Jurnal At-Turats*, Vol.9, No.2, 2015, hlm. 6.

takhta (1542–1560), kondisi sosial-keagamaan di mughal masa Jalaluddin Akbar.

BAB IV: Kebijakan Jalaluddin Akbar dalam membangun masyarakat plural di Mughal India: Kebijakan toleransi Sultan Jalaluddin Akbar berlandaskan pada toleransi universal (*Sulh-I Kull*), menghapus *Jizyah* (pajak non Muslim), *Ibadat Khana* untuk dialog antar-agama, dampak kebijakan Akbar terhadap stabilitas Mughal.

BAB V: Penutup, kesimpulan dan saran.

